

BAB I

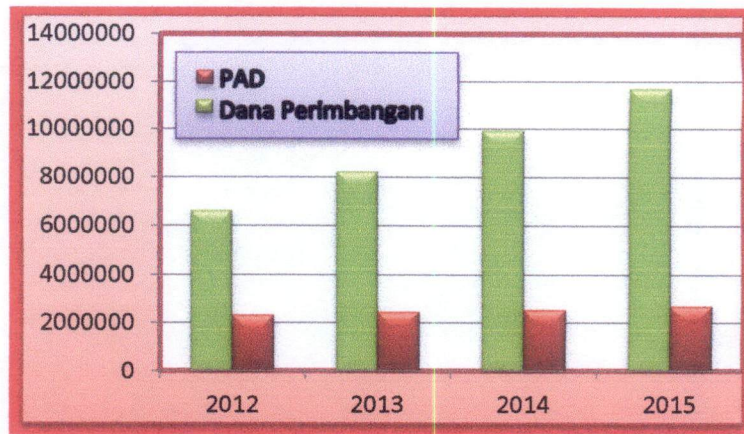
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desentralisasi fiskal merupakan pendelegasian wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Hal ini diharapkan mampu untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi ketergantungan daerah kepada Pemerintah Pusat. Desentralisasi fiskal atau biasa disebut otonomi daerah tersebut dipertegas dengan lahirnya undang-undang tentang otonomi daerah. Undang-undang tersebut yaitu Undang-Undang Nomor 22) Tahun 1999 tentang Pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 25) Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sebagai dasar penyelenggaraan otonomi daerah. Undang-undang tersebut kemudian diperbaharui menjadi Undang-undang Nomor 32) Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 33) Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah kemudian undang-undang tersebut di perbaharui lagi menjadi Undang- Undang Nomor 23) Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

Dengan adanya undang-undang tersebut setiap daerah mempunyai kewenangan mutlak untuk mengatur daerahnya. Bertanggung jawab untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan daya saing produk, menciptakan demokrasi dan keadilan di daerahnya masing-

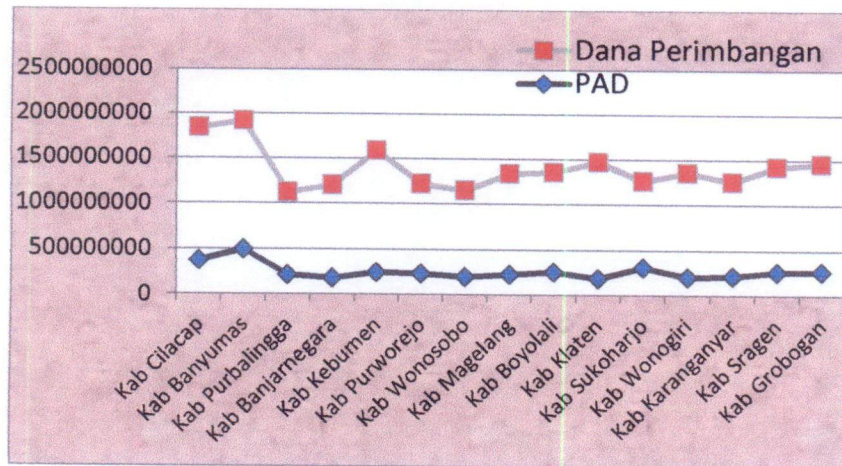
masing. Untuk dapat mewujudkan itu semua tidak dapat terlepas dari masalah finansial di setiap daerah.



Sumber : BPS Jawa Tengah

Gambar 1.1
Perbandingan PAD dan Dana Perimbangan di Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2012 - 2015

Dari gambar tersebut menunjukkan bahwasannya sumber pendapatan yang utama di Provinsi Jawa Tengah berasal dari Pendapatan Asli Daerah. Perbandingan antara Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan terlihat sangat jauh berbeda. Alokasi pendapatan dana perimbangan hanya berkisar 30% dari PAD nya. Hal ini berbeda dengan PAD pada setiap Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. Masalah keuangan di setiap daerah timbul karena keterbatasan pendapatan / PAD di daerahnya. Sehingga di perlukannya sumber penerimaan lain yang salah satunya yaitu bantuan dari Pemerintah Pusat. Hal ini dapat dibuktikan dari penerimaan Dana Perimbangan yang lebih besar dari PAD.



Sumber : BPS Kabupaten, diolah

GAMBAR 1.2
Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan di beberapa Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah

Gambar di atas hanya mengambil sampel 15 Kabupaten di Jawa Tengah dengan total 29 kabupaten dan 6 kota. Dari 15 sampel itulah dapat dilihat perbandingan antar PAD dan Dana Perimbangan. Alokasi Dana Perimbangan pada tabel tersebut tampak selalu lebih besar dari PAD. Kabupaten Cilacap berhasil memperoleh PAD sebesar Rp 373 milyar dengan Dana Perimbangan sebesar Rp 1,467 trilyun. Hal ini berarti Dana Perimbangan di Kabupaten Cilacap 4x lebih besar dari pendapatannya. Lalu untuk Kabupaten Kebumen, mampu memperoleh PAD sebesar Rp 245 milyar dengan perolehan Dana Perimbangan sebesar Rp 1.343 trilyun. Hal ini berarti Kabupaten Kebumen mendapatkan Dana Perimbangan sebesar 6x lebih besar dari pendapatan PAD.

Menurut Fisher transfer antar pemerintah atau pemberian Dana Perimbangan merupakan fenomena yang umum terjadi di semua negara di dunia terlepas dari sistem pemerintahannya. Transfer pemerintah memiliki tujuan utama yaitu untuk menginternalisasikan eksternalitas fiskal yang akan muncul antar daerah, adanya perbaikan sistem perpajakan, koreksi ketidak efisienan fiskal dan pemerataan fiskal di setiap daerah. Alokasi transfer pada negara yang sedang berkembang biasanya di dasarkan pada aspek pengeluaran pemerintah daerah tetapi kurang memperhatikan optimalisasi pendapatan dari pajak lokal. Akibatnya, pemerintah daerah selalu menuntut adanya transfer pemerintah yang lebih besar bukannya mengoptimalkan basic pajak lokal (Gorodnichenko, 2001).

Menurut Priyo (2009), belanja daerah merupakan fungsi dari pendapatan daerah yang pengeluarannya sangat bergantung dari pendapatan daerah baik yang bersumber dari daerah sendiri ataupun yang bersumber dari transfer pemerintah pusat. Sehingga dalam analisisnya jika terdapat hubungan yang negatif antara variabel belanja dengan variabel pendapatan maka hal ini disebut dengan ilusi fiskal. Belanja daerah merupakan salah satu instrument utama dalam kebijakan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah. Untuk dapat melihat kesiapan daerah dalam otonomi daerah dapat dibuktikan dengan melihat sumber-sumber pendapatannya, apakah sudah mampu untuk menutupi pengeluaran dari anggaran belanja daerah ataukah belum mampu untuk

mencukupinya. Tabel 1.1 menunjukkan realisasi Pendapatan daerah dan belanja daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Tabel 1.1
Realisasi Pendapatan dan Belanja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
Tahun 2013 – 2015

Rincian	2013	2014	2015
Pendapatan Daerah	13.343.358.326	15.157.460.005	17.097.686.334
Pendapatan Asli Daerah	8.212.800.640	9.916.358.232	11.696.822.243
Dana Perimbangan	2.467.814.629	2.542.626.745	2.694.385.621
Lain-lain Pendapatan yang Sah	2.662.743.057	2.698.475.028	2.706.478.470
Belanja Daerah	12.724.776.308	15.086.065.034	17.337.686.334
Belanja Tidak Langsung	9.213.696.623	11.117.699.785	11.665.348.934
Belanja Langsung	3.511.079.685	3.968.365.249	5.672.337.400
Surplus/Defisit	618.582.018	71.394.971	-240.000.000

Sumber : BPS Jawa Tengah

Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwasannya jumlah pendapatan daerah di Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2013 hingga 2015 selalu mengalami peningkatan. Selain pendapatan daerah, belanja daerah di tahun 2013 hingga 2015 juga mengalami peningkatan. Dari tabel tersebut dapat terlihat perbandingan selisih antara belanja daerah dengan pendapatan daerah. Pada tahun 2013 dan 2014 Provinsi Jawa Tengah mengalami surplus anggaran, namun pada tahun 2015 Provinsi Jawa Tengah mengalami devisa anggaran sebesar Rp 240 milyar. Menurut Datu (2012), jika terjadi devisa anggaran seperti di tahun anggaran 2015 maka untuk menutupi kekurangan anggran tersebut disediakan pos tambahan yaitu pos pembiayaan.

Pada dasarnya, belanja daerah merupakan salah satu komponen dalam kebijakan fiskal yang bertujuan untuk mendorong peningkatan kesempatan kerja, meningkatkan laju investasi, menciptakan distribusi pendapatan yang merata dan memelihara kestabilan ekonomi. Selain pendapatan dan belanja daerah, inflasi juga perlu untuk dipertimbangkan dalam mempengaruhi kebijakan fiskal. Jika terdapat inflasi di suatu daerah, maka inflasi tersebut dapat menggambarkan gejala ekonomi. Inflasi yang baik yaitu inflasi yang kurang dari 10%, inflasi ini tidak akan menyebabkan dampak buruk terhadap kondisi perekonomian di suatu daerah. Apabila inflasi melebihi 25% maka inflasi tersebut patut untuk diwaspadai, karena inflasi tersebut akan menaikkan harga dan menurunkan nilai tukar rupiah yang akan berdampak buruk pada perekonomian.

Tabel 1.2
Perbandingan Inflasi Provinsi Jawa Tengah dan Inflasi Nasional
pada Tahun 2015

Bulan	Inflasi Jawa Tengah	Inflasi Nasional
Januari	0.35	-0.24
Februari	0.62	-0.36
Maret	0.16	0.17
April	0.17	0.36
Mei	0.51	0.50
Juni	0.61	0.54
Juli	0.92	0.93
Agustus	0.29	6.39
September	0.15	-0.05
Oktober	0.04	-0.08
November	0.23	0.21
Desember	0.99	0.96

Sumber : BPS Nasional dan Jawa Tengah

Dari tabel tersebut dapat dilihat perbandingan inflasi antara Provinsi Jawa Tengah dan Inflasi nasional yang terlihat tidak begitu jauh perbedaannya. Inflasi tersebut tidak ada yang melebihi 1% berarti inflasi ini masih tergolong kategori inflasi baik. Inflasi yang tidak mempengaruhi harga-harga sehingga perekonomian tetap dalam keadaan stabil.

Dari beberapa hal yang telah di jabarkan di atas , maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut mengenai “Analisis Pengaruh Dana Perimbangan, Inflasi dan Jumlah Penduduk Terhadap Kinerja Fiskal di Provinsi Jawa Tengah dalam Penerapan Desentralisasi Fiskal Periode 2012 – 2015”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, adapun rumusan masalah yang akan diambil dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
- 2) Bagaimana pengaruh Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
- 3) Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
- 4) Bagaimana pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?

- 5) Bagaimana pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?
- 6) Bagaimana pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang telah di jabarkan, maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini yaitu:

- 1) Mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- 2) Mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- 3) Mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Pendapatan Asli Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- 4) Mengetahui pengaruh Dana Perimbangan terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- 5) Mengetahui pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.
- 6) Mengetahui pengaruh Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini yaitu:

1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengembangan teori khususnya tentang desentralisasi fiskal dan dapat memberikan tambahan pengetahuan bagi pembacanya.

2) Manfaat Praktis

a. Hasil dari penelitian ini diharapkan mampu untuk membantu pengembangan wawasan dan pengetahuan tentang sistem desentralisasi fiskal serta kelebihan dan kekurangan sistem desentralisasi fiskal tersebut.

b. Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan mengenai pengaruh dari Transfer Pemerintah, Inflasi dan Jumlah penduduk terhadap PAD dan pengaruh Transfer Pemerintah, PAD dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah.

3) Manfaat bagi Peneliti

a. Bagi peneliti, penelitian ini dapat mengembangkan wawasan dan pengetahuan tentang desentralisasi fiskal dan dapat digunakan untuk penggabungan ilmu dan teori

yang didapat semasa masih di bangku kuliah dengan kesesuaian praktik di lapangan.

- b. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat di jadikan bahan acuan untuk penelitianberikutnya agar penelitian yang sudah dilakukan dapat terus berkembang.